

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN KOTA BATU

Suci Navasari¹, Ihsan Nuralim²

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia¹

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia²

E-mail: sucinavasari@gmail.com

ABSTRAK

Problem umum yang sering menghinggapi partai politik adalah konflik internal, dan kadang yang menghancurkan partai politik (parpol) itu sendiri. Namun demikian jarang sekali ada partai politik yang mempunyai mekanisme penyelesaian konflik internal sehingga banyak partai yang dilanda konflik mengalami perpecahan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme penyelesaian konflik internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sementara pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan pendekatan historical researct. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDI-P Kota Batu rendah terjadi konflik internal yang besar. Disamping itu struktur kepengurusan PDI-P Kota Batu banyak bergantung kepada keputusan-keputusan dari pimpinan pusat PDI-P. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa PDI-P memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dibuktikan dari rendahnya khusus konflik yang terjadi. Oleh karena itu PDI-P membutuhkan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan manajemen organisasi. Pemerintah perlu membuat peraturan perundangan yang memberikan jaminan bagi partai politik agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan konflik internal.

Kata Kunci: *Konflik internal, partai politik, mekanisme penyelesaian konflik.*

ABSTRACT

A common problem that often afflicts political parties is internal conflict, and sometimes that destroys the political party itself. However, it is rare for a political party to have an internal conflict resolution mechanism so that many parties affected by conflict experience divisions. The purpose of this study is to examine the mechanism for resolving internal conflicts within the Indonesian Democratic Party of Struggle in Batu City. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Meanwhile, data collection was carried out through observation, interviews and historical research approaches. The results showed that the PDI-P in Batu City was low. There was a large internal conflict. In addition, the management structure of the PDI-P in Batu City depends a lot on

the decisions of the PDI-P central leadership. Thus, it can be concluded that PDI-P has an effective conflict resolution mechanism as evidenced by the low specificity of the conflicts that occur. Therefore, PDI-P requires greater autonomy to the regions to carry out organizational management. The government needs to make laws and regulations that provide guarantees for political parties so that conflicts do not occur due to internal conflicts.

Keywords: *Internal conflicts, political party, conflict resolution mechanism*

PENDAHULUAN

Konflik adalah sebuah salah satu esensi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia dengan memiliki berbagai karakteristik yang cukup beragam. Diantara karakteristik / ciri-ciri manusia tersebut diantaranya adalah strata sosial dan ekonomi, perbedaan jenis kelamin, sistem hukum, budaya, agama, suku, kepercayaan, aliran politik, bahkan tujuan hidup yang berbeda-beda. Konflik sering dimaknai sebagai benturan dari bermacam-macam pemahaman, keyakinan, perselisihan, tidak adanya kata mufakat, terjadinya pergesekan, bahkan perkelahian atau perlawanan dengan senjata tajam dan kekerasan materil maupun non materil. (NB., 2021). Konflik sangat memengaruhi performa kinerja sumber daya manusia karena konflik merupakan energi yang mampu menggerakkan anggota-anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu konflik juga akan menjadi kekuatan apabila bersifat fungsional yang artinya konflik mampu mengangkat isu tentang persoalan yang menghambat organisasi. Kemudian ketika terdapat masalah dan diberikan sebuah solusi, maka konflik yang

terjadi akan berdampak pada perbaikan kapasitas kinerja sumber daya manusia organisasi itu sendiri (Tommy Juliantara, 2021). Untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan maka dalam kehidupan bernegara setiap organisasi harus berlandaskan dengan hukum. Mengingat Indonesia merupakan negara yang masuk dalam negara yang berlandaskan hukum. Sehingga ketika terjadi konflik maka akan segera terselesaikan dengan landasan hukum yang ada.

Mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta tata pemerintahan yang senantiasa yang mengharuskan berlandaskan hukum, maka diperlukan penyelenggaraan pembangunan hukum nasional yang berlangsung berdasarkan sistem perundang-undangan nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD 1945) (Sihombing et al., 2020). Mewujudkan kehidupan bernegara ini berlandaskan hukum sehingga berkaitan dengan hukum tata negara. Hukum tata Negara mengatur mekanisme hubungan antara masyarakat dengan negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku, dalam

hal ini yang meliputi adalah hubungan antara negara atau penguasa dengan masyarakat dalam berbagai aktivitasnya, termasuk aktivitas masyarakat yang mewujudkan keberadaannya sebagai partai politik (Ghifari et al., 2017). Sistem partai politik yang dianut oleh Indonesia adalah sistem partai politik multipartai yang artinya sistem kepartaian yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat lebih dari dua partai politik. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan luas sehingga memunculkan berbagai macam budaya, agama, ras dan suku sehingga sistem multipartai ini berdampak pada jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Maka partai politik yang berdiri di Indonesia membawa ideologinya masing-masing.

Partai politik merupakan pilar utama pemerintahan demokrasi suatu negara. Keberadaan partai politik di negara sebagai bentuk representasi masyarakat diyakini mampu mempengaruhi perkembangan demokrasi khususnya dalam ranah politik suatu negara. Jika perkembangan demokrasi di tanah air ditandai dengan adanya partai politik, maka keberadaan partai politik di Indonesia tidak terlepas dari konflik internal partai politik (Djuyandi & Suparman, 2020). Munculnya konflik internal dalam sebuah partai politik yang berimbas pada keretakan partai politik ini disebabkan oleh berbagai alasan, baik dari yang bersifat ideologis

atau idealis maupun yang bersifat pragmatis. Dalam hal yang bersifat pragmatis tidak dipungkiri bahwa adanya kebebasan serta keterbukaan politik memberikan peluang bagi siapapun untuk mendapatkan kekuasaan dan partai politik mampu memberi peluang bagi siapapun untuk mendapatkan kekuasaan. Konflik internal yang terjadi di partai demokrasi Indonesia perjuangan Kota Batu tidak begitu membahayakan keberadaan partai politik itu sendiri. Menurut hasil wawancara dan observasi konflik internal yang sering terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batu hanya sebatas tentang perbedaan pendapat antar anggota dan banyaknya ide-ide yang tertuang dalam forum sehingga menimbulkan perdebatan. Ketua DPC PDI-P Kota Batu mengatakan tidak memperlmasalahkan konflik internal ini terlalu rumit, karena semuanya dapat terselesaikan dengan tepat dan tegas. Sehingga tidak menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan di dalam partai politik. Selain itu juga PDI-P Kota Batu memiliki visi misi dan anggaran dasar (AD), adanya hal tersebut maka konflik internal yang terjadi juga sedikit dan cepat teratasi dengan tepat.

Penyelesaian konflik internal setiap partai politik berbeda-beda. Konflik internal yang terjadi pada partai politik dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara dan bagaimana ketegasan pemimpin partai politik. Pemimpin partai politik mambu

berkaca pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang berisikan tentang mengatur beberapa cara penyelesaian perselisihan partai politik. Beberapa penelitian terdahulu hanya menjelaskan terkait konflik antar partai dan kepentingan elit politik saja di dunia politik bukan tentang mekanisme penyelesaian konflik internal seperti penelitian yang dilakukan (Hannan, n.d., 2021) yang berjudul *Problem Politik Kabinet Koalisi, Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik*, (Nurak & Bao, n.d., 2019) yang berjudul *Konflik Internal Partai Politik studi tentang Dualisme Kepemimpinan Partai Hanura Lainnya*, (Madalina & Adityanta, n.d.) yang berjudul *Analisi Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi*.

Dari latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah dalam penulisan artikel ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian konflik internal di paratai demokrasi Indonesia perjuangan Kota Batu. Sehingga tujuan dari penelitian adalah menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian konflik internal di PDI-P Kota Batu. Urgensi dari pada penelitian ini adalah supaya pembaca mengetahui dan memahami bagaimana cara penyelesaian konflik yang terjadi di internal partai politik dan pentingnya mahasiswa Indonesia mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian konflik internal di sebuah partai politik.

Penelitian ini mengadopsi teori kontribusi yang dikemukakan oleh Simon Fisher dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan konflik internal. Ada empat (4) teori yang diajukan: Pertama, Fisher mengajukan beberapa teori untuk menganalisis penyebab konflik, termasuk teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik internal disebabkan oleh polarisasi yang terus menerus, ketidakpercayaan, dan permusuhan antara kelompok - kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat atau organisasi. Teori koneksi ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian di antara kelompok - kelompok yang berkonflik. Teori koneksi ini juga mengutamakan toleransi yang cukup luas sehingga masyarakat lebih mudah menerima keragaman yang dikandungnya. Yang kedua adalah prinsip teori negosiasi. Teori negosiasi ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan persepsi yang berbeda tentang konflik antara pihak - pihak yang berkonflik. Ketiga, teori kebutuhan manusia berpendapat bahwa konflik yang mendalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial yang tidak terpenuhi atau terhalang keamanan, identitas, persetujuan, partisipasi, dan otonomi sering kali menjadi inti dari percakapan. Keempat, teori identitas, yang berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam yang seringkali berakar pada

rasa sakit kehilangan masa lalu yang belum terselesaikan (Arianto et al., 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Partai Politik

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 mengenai partai politik pada niat dasar pendirian partai politik yaitu “Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibuat sang sekelompok rakyat negara Indonesia secara sukarela atas dasar kecenderungan kehendak dan impian buat memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa & negara, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1954) (Kurniawan et al., 1945).

Carl Friendrich mengungkapkan partai politik adalah sekelompok orang yang diorganisir menggunakan kandang kuda yang tujuannya adalah untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan pemerintahan bagi para penguasa material dan untuk bersikap adil kepada para anggotanya. Pada saat yang sama, Soltau mengatakan partai adalah unit politik yang kurang terorganisir yang menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan umum sesuai dengan harapan mereka. Ramlan Surbakti kemudian menambahkan bahwa setiap partai politik di dunia harus memiliki ideologi, baik doktrinal,

pragmatis atau keduanya. Dengan demikian Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang diorganisir oleh anggota-anggota yang rapi dan stabil, dipersatukan dan dimotivasi oleh ideologinya, berdasarkan partai-partai tersebut di atas, usaha-usahanya harus dicari, direbut dan dipertahankan. Kekuasaan pemerintah diperoleh melalui pemilihan umum biasa sehingga dapat melaksanakan kebijakan. (Ainurrohmah, 2019).

Teori Konflik

Konflik merupakan hal yang melekat dalam sebuah organisasi. Tidak ada organisasi yang dapat menghindari konflik. Konflik yang terjadi di masyarakat dapat berbentuk kekerasan (materi) maupun non-kekerasan (non materi). Konflik yang berupa kekerasan adalah konflik antar pihak yang saling merugikan atau menghancurkan. Konflik non -kekerasan, di sisi lain adalah konflik berdasarkan perbedaan pendapat dan ide. Dalam demokrasi perbedaan pendapat dan perselisihan adalah bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri, dan secara sederhana makna konflik terletak pada perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, atau antar kelompok. Konflik kepentingan juga termasuk konflik kepentingan politik, sehingga disebut juga konflik politik. Ada tiga jenis konflik politik. Pertama, konflik politik yang timbul dari perebutan status dan kekuasaan politik. Kedua,

konfrontasi politik melalui aksi politik. Ketiga, konflik politik muncul dari perbedaan pandangan tentang institusi politik (Romli, n.d.).

Teori konflik adalah teori yang berpendapat bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai yang membawa perubahan, tetapi melalui konflik yang mengarah pada integrasi yang berbeda dari keadaan semula. Konflik muncul karena hubungan sosial dan komunikasi. Jika kita ingin belajar tentang konflik, kita perlu memahami pola dan perilaku komunikasi dan konflik tidak selalu disebabkan oleh komunikasi yang buruk (NB., 2021). Rivalitas politik pada dasarnya ada dua yang disebabkan oleh pluralisme horizontal dan yang disebabkan oleh pluralisme vertikal. Pluralisme horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku, daerah, agama, dan ras. Pluralisme budaya dapat menciptakan friksi yang berujung pada konflik, karena setiap budaya secara inheren mempertahankan identitas dan kekhususan budayanya. Apalagi di dunia sekarang ini, di mana sistem informasi sudah begitu maju sehingga arus informasi menjadi begitu mudah sehingga eksistensi budaya pun terancam. Untuk menghindari konflik politik pluralisme horizontal, orang perlu menyepakati pegangan bersama atas nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Hal ini untuk menghindari konflik politik yang disebabkan oleh konflik budaya. Konflik juga dapat

disebabkan oleh pluralisme sosial lateral. Hal ini dikarenakan setiap kelompok memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan berdasarkan pekerjaan, pekerjaan dan tempat tinggal. Pluralisme vertikal adalah struktur masyarakat yang bertentangan menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan, dan konflik dapat disebabkan oleh pluralisme vertikal karena perbedaan, dengan mereka yang memiliki sedikit atau tidak memiliki kekayaan, pengetahuan atau kekuasaan, kekuasaan dan pengetahuan mendominasi (D & Qur'ani, 2019). Setelah menyadari bahwa konflik merupakan konsep sosial yang penting dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam ilmu-ilmu pemerintahan. Konflik adalah salah satu fenomena utama dalam organisasi (NB., 2021).

Konflik Politik

Weber juga menggambarkan hubungan antara konflik dan kekuasaan atau politik. Menurutnya, dalam *The Theory of Social and Economic Organization* (1947), konflik dapat terjadi dalam segala bentuk stratifikasi. Hirarki tidak hanya tentang ekonomi tetap, tetapi juga tentang status dan kekuasaan. Orang atau kelompok tertentu ingin mencapai posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka melakukan banyak hal untuk memperjuangkannya. Lapisan tampaknya menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Semoga semua hubungan dipenuhi dengan perjuangan untuk status tinggi di

stratosfer. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang dapat memperjuangkan kekuasaan. Hal ini difasilitasi karena kekuasaan pada dasarnya merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Ainurrohmah, 2019).

Konflik Internal

Konflik di dalam partai politik tidak hanya berasal dari perebutan kekuasaan tetapi juga dari perselisihan antar faksi. Zariaski mendefinisikan faksi sebagai kelompok intra-partai yang anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan faksi sangat bervariasi. Misalnya, mempertahankan patronase partai dan kontrol faksi, mempengaruhi strategi dan kebijakan partai, dan mengusulkan nilai-nilai baru kepada partai. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa fraksi memiliki dua elemen kunci. Sub - kelompok yang merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar dan sub - kelompok yang disatukan oleh identitas dan tujuan yang sama (Romli, n.d.). Indikator konflik politik terutama bersifat pribadi. Artinya, anda dapat mengidentifikasi perbedaan pandangan dan karakteristik kepemimpinan. Kedua, secara kolektif, dibuktikan dengan interaksi sosial antar anggota (Nurak & Bao, n.d.).

Penyelesaian Konflik

Menurut Stevenin dari Handoko (2001:48), ada lima (5) langkah resolusi konflik. Terlepas dari penyebab masalahnya, kelima langkah ini sangat mendasar untuk menangani

konflik. Yang pertama adalah pengenalan. Kesenjangan antara apa yang ada atau tampak dan apa yang seharusnya. Dalam beberapa kasus, jebakan gagal untuk dideteksi (abaikan masalahnya atau anggap tidak ada). Diagnosa kedua. Cara yang benar untuk memahami bertentangan dengan cara mengetahui siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Fokus pada isu-isu utama, bukan hal-hal sepele. Ketiga, saya setuju dengan solusi anda. Kumpulkan semua kontribusi dari pihak lawan untuk solusi yang mungkin. Singkirkan solusi yang tidak realistis atau tidak praktis. implementasi ke 4. Selalu ada peluang untung dan rugi saat mengambil keputusan. Jangan biarkan pertimbangan-pertimbangan ini mempengaruhi keputusan atau arah dari kelompok orang tertentu yang sedang berkonflik. Peringkat kelima. Solusi dapat menciptakan masalah baru. Jika solusi sebelumnya gagal, anda dapat memeriksa apakah proses sebelumnya gagal atau anda dapat kembali melakukan langkah sebelumnya (Tommy Juliantara, 2021). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang berbagai cara penyelesaian perselisihan antar partai politik:

1. Perselisihan parpol diselesaikan secara internal oleh parpol sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Tata Tertib (ART).
2. Penyelesaian perselisihan antar partai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengadilan

- partai atau badan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan pengadilan partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada kementerian oleh pimpinan partai.
 4. Penyelesaian perselisihan antara para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 hari.
 5. Keputusan Pengadilan Para Pihak atau yang ditunjuk lainnya bersifat final dan mengikat secara internal sehubungan dengan penyelesaian yang berkaitan dengan administrasi (Aulia, 2017).

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, tindakan, motivasi dan persepsi yang diungkapkan dalam bentuk penjelasan. Penjelasan ini didukung oleh Patton (1980) dalam Ahmadi (2016:15), yang menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena alam dalam situasi alam. Pengumpulan sumber data untuk *whitepaper* ini dilakukan dengan dua (2) cara yaitu dengan pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang utama adalah dengan mewawancarai beberapa informan (yang memiliki banyak informasi).

Data sekunder, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yaitu buku, jurnal, media massa, dokumen dan pendekatan *historical researct*.

Teknik pengumpulan data untuk pelapor ditentukan untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, peneliti telah menentukan sejumlah kriteria untuk informasi apa yang mereka butuhkan. Diantaranya memahami konflik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Batu, memahami keadaan Partai Demokrasi Indoensia – Perjuangan Kota Batu. Di Batu, sampai dengan keputusan akhir dan wawancara Ketua Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan Kota Batu dan Sekretaris jendral Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrasi Indoensia - Perjuangan Kota Batu sebagai informan penelitian tahun 2022. Reduksi data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan, penataan kembali data, interpretasi data, dan validasi atau uji keabsahan data. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk melakukan proses validasi data, sehingga peneliti dapat melintasi berbagai sumber data terkait kompetisi internal PDI-P Kota Batu tahun 2022. Lalu peneliti melakukan pengecekan ulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam buku berjudul *The Functions of Social Conflict*, Coser melihat keberadaan konflik sebagai

bagian yang normal dan fungsional dari kehidupan manusia. Konser tersebut berusaha untuk menyelesaikan tingkat kekerasan dengan konsekuensi fungsional dari konflik. Menurut Coser, konflik bersifat impulsif dan terjadi sepanjang waktu dalam kehidupan manusia. Konflik yang dapat diartikan sebagai proses yang memberikan kontribusi pada pembentukan, kesatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Bagi Coser, konflik berjalan seiring dengan pembentukan kesatuan kelompok. Dalam struktur *high and small*, konflik merupakan indikator hubungan yang sehat (Djuyandi & Suparman, 2020). Secara umum, konflik dapat bersifat destruktif dan bersifat konstruktif (Mutakin, 2019).

atas, Okoye (2015) menambahkan penggantian calon yang salah dan tidak sah, yang berarti penggunaan kekuasaan *incumbent*, perpecahan dalam partai politik, wewenang Komisi Pemilihan Nasional Independen untuk memenuhi syarat dan atau mendiskualifikasi kandidat dan penyimpangan dan penyimpangan pemilihan. Faktor-faktor ini merupakan bagian dari dua masalah utama-kurangnya ideologi partai dan demokrasi internal (Neji & Politik, 2018). (NB., 2021) menyuraikan beberapa penyebab konflik dalam suatu organisasi merupakan perbedaan kepribadian, pertentangan kepentingan, penghambat komunikasi, kelangkaan sumber daya dan gaya administratif yang otokrasi.

Gambar.1 Sifat Konflik



Faktor-faktor yang mempengaruhi partai politik untuk berselisih begitu banyak. Seperti yang dikutip dalam Yahya & Ibrahim (2015), faktor-faktor tersebut diidentifikasi antara lain kurangnya ideologi, tidak adanya demokrasi internal, faktor *incumbency*, ketidaksesuaian tujuan, *godfatherisme* dan politik kepentingan pribadi. Di

Konflik internal yang ada di dalam partai politik PDI-P pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu diantaranya konflik antar elemen partai dan konflik di tingkat pimpinan partai (DPP) (Eko W et al., 2020). Seperti halnya konflik internal yang terjadi di lingkungan PDI-P di Kota Batu, konflik internal dengan PDI-P sangat wajar terjadi. Konflik internal yang muncul di dalam partai politik dapat menjadi wahana untuk menyatukan, membentuk, dan memelihara struktur sosial. Selain itu, melalui konflik internal yang terjadi di PDI-P Kota Batu, diperjelas batas-batas partai politik dan anggota yang belum mampu memberikan kontribusi yang cukup bagi PDI-P Kota Batu. Perkembangan konflik internal ini

dapat menyebabkan anggota pasif untuk berpartisipasi dalam integrasi ke dalam partai untuk menyelesaikan konflik internal. Konflik internal yang berkepanjangan tanpa akhir yang jelas menyebabkan perselisihan faksi politik. Profesor Yasona H. Laoly, dalam bukunya Manajemen Perselisihan Partai Politik, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan partai politik yaitu dengan demikian, beberapa kader anti-partai dapat dianggap berbahaya bagi elit dengan memerintah partai begitu kuat sehingga mereka dapat diberhentikan oleh elit partai. Kedua, kepentingan politik di luar partai. Hal ini biasanya terlihat pada dinamika pemilihan kepala daerah atau koalisi untuk mengumpulkan suara. Para eksekutif yang berbeda pendapat tentang keputusan politik mencalonkan diri untuk jabatan publik secara terbuka mengungkapkan kritik dan protes di forum internal dan bahkan mengeluarkan pernyataan di media massa. Kami mengambil jalan pintas dengan memecat mereka karena perbedaan pendapat daripada mengambilnya (Nurak & Bao, n.d.).

Dari hasil wawancara di DPC PDI-P Kota Batu konflik internal yang terjadi di PDI-P Kota Batu tidak begitu banyak diantaranya hanya perselisihan pendapat dan banyaknya ide-ide yang tertuang sehingga menimbulkan perdebatan. Sedangkan konflik yang seperti kepentingan elit politik dan kepentingan politik di luar partai sangat jarang terjadi. Hal ini di karenakan hanya dilingkup DPC PDI-P Kota Batu

buka di lingkup partai pusat. Adanya konflik internal yang begitu sedikit maka sudah jelas bahwa komunikasi yang dibangun didalamnya sangatlah bagus, kapasitas yang dimiliki sangatlah berkualitas dan solidaritas didalamnya sangatlah tinggi. Dan yang paling penting adalah demokrasi yang diterapkan didalamnya. Selain itu juga terdapat visi misi dan anggaran dasar didalamnya yang membuat minimnya terjadi konflik internal. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa PDI-P memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dibuktikan dari rendahnya khusus konflik yang terjadi. Oleh karena itu PDI-P membutuhkan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan manajemen organisasi. Pemerintah perlu membuat peraturan perundangan yang memberikan jaminan bagi partai politik agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan konflik internal.

Sekretaris DPC PDI-P Kota Batu menyatakan Visi dan Misi dari pada PDI-P diantaranya dapat dilihat bagan dibawah ini :

Gambar. 2 visi dan misi PDI-P



Berdasarkan diagram visi dan misi PDIP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Visi Partai PDI-P berdasarkan Pasal 6 adalah:

1. Alat perjuangan membentuk dan membangun karakter bangsa, berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
2. Sarana Perjuangan Lahirnya Negara Ketuhanan dan Negara yang Berjiwa Sosial Nasionalisme dan Sosial Demokrasi (Tri Sila)
3. Sarana perjuangan melawan segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan kembali semangat dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).
4. Wadah komunikasi politik, pembinaan dan peningkatan partisipasi politik warga negara, serta berjiwa kepeloporan, mampu memahami dan menjelaskan ajaran Bung Karno, dan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat. negara bagian untuk membentuk kader.

Sedangkan Misi berdasarkan AD partai PDI Perjuangan pasal 7, 8, 9 dan 10 yaitu:

1. Pasal 7 Partai politik yang tujuan keseluruhannya adalah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kerangka negara kesatuan masyarakat

Republik Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berusaha mewujudkan Indonesia yang sejahtera dengan keadilan sosial, kedaulatan di bidang politik, otonomi di bidang ekonomi dan Indonesia dengan identitas budaya.

2. Pasal 8 Partai politik dengan tujuan khusus adalah untuk mendirikan gerakan politik yang berdasarkan kekuatan rakyat, untuk mewujudkan keadilan sosial, membangkitkan semangat, memperkuat kemauan, berorganisasi dengan tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan membimbing masyarakat. kepentingan politik, ekonomi dan politik rakyat, hak-hak sosial dan budaya, khususnya perjuangan untuk pemenuhan kebutuhan mutlak rakyat, yaitu kebutuhan material berupa pangan, sandang, papan dan transportasi serta kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan, mengusahakan kekuatan politik konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan misi konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; semangat kerjasama internasional dalam

upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasal 9 Kepala pendidikan dan pelatihan masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan kewajiban sipilnya. Merekrut anggota dan kader partai untuk mengabdikan diri di organisasi partai, lembaga dan lembaga politik. Mengembangkan kader partai yang memiliki jiwa kepeloporan dan keterampilan pemahaman serta kemampuan memaknai dan mengimplementasikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengumpulkan, merumuskan dan memenangkan aspirasi rakyat dalam politik pemerintahan negara. Mengumpulkan, membangun dan menggalang kekuatan rakyat untuk membangun dan mewujudkan cita-cita masyarakat Pancasila. Membangun komunikasi politik sesuai dengan hakikat kehidupan politik dan membangun partisipasi politik warga negara..

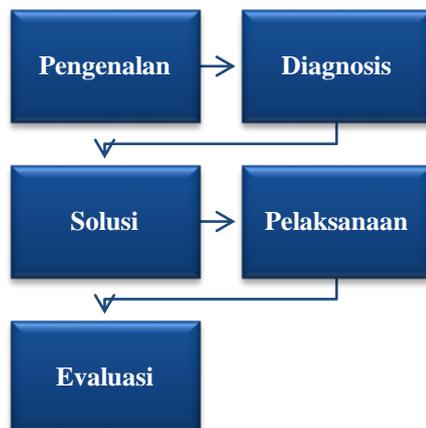
Melihat dari visi, misi dan anggaran dasar diatas tahap-tahap penyelesaian konflik internal yang dilakukan adalah melalui tahapan komunikasi politik (*political communication*), proses *political communication* ini dilakukan dengan melakukan komunikasi yang baik antara kelompok yang bersangkutan dalam konflik internal. Ketika

komunikasi dibangun dengan baik maka konflik internal yang terjadi sangatlah minim. Terdapat lima langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik internal dan mengatasi kesulitan dari konflik tersebut yaitu:

1. Mengenali atau pengenalan. Kesenjangan antara apa yang ditentukan dan apa yang seharusnya. Satu-satunya perangkap adalah mengabaikan masalah, mengabaikannya, atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak.
2. Mendiagnosa. Pada langkah ini, selidiki dengan benar penyebab konflik. Metode 5W + 1H yang akurat dan terbukti bekerja dengan sempurna dan berfokus pada masalah utama daripada hal - hal sepele.
3. Ketiga Solusi. Fase ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang kemungkinan solusi dari para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan solusi yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis dengan solusi terbaik.
4. Implementasi atau pelaksanaan. Fase ini mengacu pada implementasi sesuai dengan solusi yang dibuat berdasarkan kekuatan dan kelemahan proses implementasi.
5. Lima evaluasi. Banyak masalah baru dapat muncul selama fase Penyelesaian. Jika solusi tampaknya tidak berhasil, kembali ke langkah sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sesuai dengan fase sebelumnya (NB., 2021).

Penyelesaian konflik diatas sebagaimana dapat dilihat dibagan berikut ini.

Gambar. 3 *Prosedur Penyelesaian konflik*



Peran komunikasi dalam penyelesaian konflik sangatlah penting. Sumber komunikasi menjadi sangat penting perannya dalam interaksi dan komunikasi dalam bentuk apa pun. Hal ini sangat signifikan dalam apa yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oleh karena itu sebelum melakukan komunikasi, maka komunikator harus mampu terlebih dahulu membuat strategi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk simbol atau kode dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan efek untuk mengubah sikap atau tindakan (Meifilina, 2021). Strategi komunikasi yang dilakukan partai PDI-P dalam melakukan pendidikan politik adalah terlebih dahulu menetapkan komponen-komponen yang terkandung dalam konsep komunikasi *Harold D. Laswell*,

yaitu *Who Says What to Whom in Which Channel with What Effect* (Meifilina, 2021). Model penyelesaian komunikasi yang perlu di implementasikan juga dalam penyelesaian konflik internal adalah model komunikasi managing staff. Managing staff merupakan model komunikasi yang berfokus pada penyelesaian komunikasi internal dan teks informasi. Bentuk komunikasi juga berupa intruksi seperti *what? Who?* Lalu untuk hasil intruksi berupa laporan dan evaluasi. Dalam penyelesaian konflik internal di sebuah partai politik perlu juga memahami terkait *The Government Communication Process Model* (Hiebert, 1981) yang di mana dalam internal mampu menerapkan strategi mengelola informasi yaitu dimana internal harus mampu untuk menahan informasi, membeberkan informasi, memanfaatkan momen khusus dan merayu publik. Dan yang terakhir adalah *Synthesis Model of Public Sector Crisis Comm* (Horsley and Barker, 20002) disini pihak internal di paksa untuk fokus pada integrasi, koordinasi politik dan situasi krisis sehingga harus mempertimbangkan upaya komunikasi yang sedang berlangsung, mengidentifikasi dan mempersiapkan potensi krisis, peristiwa, evaluasi dan revisi upaya komunikasi dan yang terakhir menganalisis kondisi institusidan koordinasi politik.

KESIMPULAN

Konflik bersifat impulsif dan terjadi sepanjang waktu dalam kehidupan manusia. Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkontribusi pada penyatuan, pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial. Bagi Coser, konflik berjalan seiring dengan pembentukan kesatuan kelompok. Dalam struktur besar dan kecil, konflik merupakan indikator hubungan yang sehat. Seperti halnya konflik internal yang muncul di lingkungan PDI-P, konflik internal adalah hal yang wajar karena perjuangan PDI tumbuh sebagai organisasi dan organisme dan terbentuk secara tepat dan cepat. Konflik internal yang muncul di dalam partai dapat menjadi wahana untuk mempersatukan, menegakkan dan menopang struktur sosial yang dibangun oleh DPC PDI-P Kota Batu.

Disamping itu melalui konflik internal yang terjadi di PDI-P Kota Batu ini sangat Memperjelas garis partai dan mengizinkan anggota partai yang belum berkontribusi penuh kepada PDI-P Kota Batu untuk berintegrasi ke dalam partai untuk menyelesaikan perselisihan. Dari hasil wawancara di DPC PDI-P Kota Batu konflik internal yang terjadi di PDI-P Kota Batu tidak begitu banyak diantaranya hanya perselisihan pendapat dan banyaknya ide-ide yang tertuang sehingga menimbulkan perdebatan. Adanya konflik internal yang begitu sedikit maka sudah jelas bahwa komunikasi yang dibangun

didalamnya sangatlah bagus, kapasitas yang dimiliki sangatlah berkualitas dan solidaritas didalamnya sangatlah tinggi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa PDI-P memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dibuktikan dari rendahnya khusus konflik yang terjadi. Oleh karena itu PDI-P membutuhkan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan manajemen organisasi. Pemerintah perlu membuat peraturan perundangan yang memberikan jaminan bagi partai politik agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan konflik internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohmah, S. (2019). *Dinamika konflik Partai Politik dalam Pemilihan umum walikota Surabaya Tahun 2015*. 9–36.
- Arianto, A., Zetra, A., & Fadhilah, R. R. (2021). Konflik Politik Dalam Kepengurusan Partai Di Sumatera Barat. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 1(1), 76–84. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1871>
- Aulia, H. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik) PENDAHULUAN Kajian mengenai partai politik (parpol) merupakan aspek penting di dalam ilmu hukum tata negara . Bila berbic. 1(November), 43–50.*

- D, D., & Qur'ani, B. (2019). Increasing Community Knowledge Through the Literacy Movement. *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v2i1.235>
- Djuyandi, Y., & Suparman, S. M. (2020). Konflik Internal PPP Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 176–190. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13694>
- Eko W, A. R., Kurniawati, K., Yanuardi, M. H., & Maulani, M. (2020). Dwifungsi ABRI Dalam Konflik Internal PDI 1976-1998. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 179–192. <https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.11162>
- Ghifari, M. A. D. Al, Hananto, R. . U. D., & Herawati, R. (2017). Hukum Tata Negara sebagai Hukum Tata Negara mengatur Sistem ini cocok dengan Pembangunan Partai Persatuan Pembangunan didirikan Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Isl. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Hannan, A. (n.d.). *Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik*. <https://nasional.kompas.com/>
- Kurniawan, I. G. H., Olivia, F., Suprayogi, A., Slamet, S. R., Hari, A., & Arianto, H. (1945). *SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*.
- Madalina, M., & Adityanta, A. (n.d.). *Analisis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi*.
- Meifilina, A. (2021). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 101–110. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2.80>
- Mutakin, A. (2019). Resolusi Konflik Melalui Nilai-nilai Kultur Pesantren. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(1), 91–118. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.371>
- NB., M. (2021). Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik: Suatu Tinjauan Teoritis. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(2), 194. <https://doi.org/10.35914/jemma.v3i2.643>
- Neji, N., & Politik, D. I. (2018). *Resolusi*. 4(4), 28–41.
- Nurak, A., & Bao, B. (n.d.). *Konflik Internal Partai Politik studi*

- tentang Dualisme Kepemimpinan Partai Hanura.*
- Romli, L. (n.d.). *Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi Coalition and Internal Party Conflicts of Reform Era in Indonesia.*
- Sihombing, E. N. A. M., Widati, S., & Hadita, C. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah The Implementation of Omnibus Law in The Establishment of Local Legislation. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 88–97. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakum>
- Tommy Juliantara. (2021). Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi Masyumi Menanggapi Perjanjian Roem-Royen Tahun 1949. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(2), 373–392. <https://doi.org/10.55372/inteleksi ajpid.v2i2.102>